

Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia

Dudi Septiadi^{1*}, Pande Komang Suparyana²
Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

dudi@unram.ac.id

ABSTRACT

Poverty is an urgent problem to be overcome immediately because not only includes economic problems but also social problems and domestic political instability. Poor population is the population who are unable to meet the minimum basic food and non-food needs. This study aims to analyze the factors that affect poverty in Indonesia and analyze rice policy, economic growth and fiscal policy on poverty alleviation in Indonesia. This research method used multiple regression analysis with time series data from 1988 - 2017. The results showed that statistically, the coefficient of determination (R²) was quite high. Based on the F-statistic test, all independent variables simultaneously have a significant effect on the dependent variable. Based on partial significance test, Indonesian rice production variable, Indonesian total rice import variable, government purchase price variable on rice commodity and economic growth variables respectively have a significant effect on poverty variable. The elasticity values of Indonesian rice production variable, Indonesian total rice import variable, government purchase price variable on rice commodity and economic growth variable has elasticity values that are inelastic. While the variable government spending on infrastructure has no effect on the poverty variable.

Keywords: Poverty; Rice Policy; Fiscal policy; Economic growth

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang mendesak untuk segera diatasi karena tidak hanya meliputi masalah ekonomi semata, namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Penduduk miskin yaitu penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan nonmakanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dan menganalisis kebijakan perberasan, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan data time series dari tahun 1988 – 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, nilai koefisien determinasi (R²) cukup tinggi. Berdasarkan uji F-statistik, secara bersama-sama seluruh variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Berdasarkan uji signifikansi secara parsial, variabel produksi beras Indonesia, variabel jumlah impor beras Indonesia, variabel harga pokok pembelian pemerintah pada komoditi beras dan variabel pertumbuhan ekonomi masing-masing berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. Nilai elastisitas variabel produksi beras Indonesia, variabel jumlah impor beras Indonesia, variabel harga pokok pembelian pemerintah pada komoditi beras dan variabel pertumbuhan ekonomi masing-masing memiliki nilai elastisitas yang bersifat inelastis. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur tidak berpengaruh terhadap variabel kemiskinan.

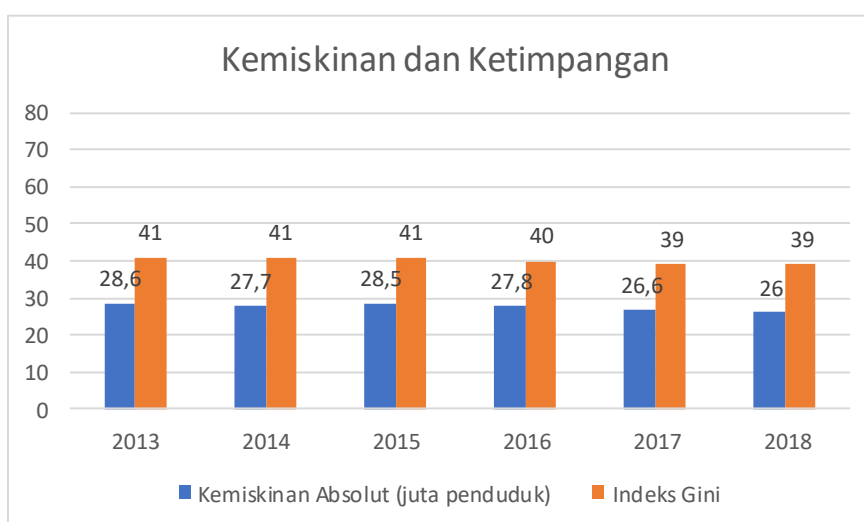
Keywords: Kemiskinan; Kebijakan Perberasan; Kebijakan Fiskal; Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi, karena tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Sejarah mencatat reformasi 1998 diawali krisis keuangan Asia yang berdampak kepada krisis moneter dan tertekannya masyarakat kelas bawah yang hidup di lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, masalah pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi, baik kebijakan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Disisi lain masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah mendesak dalam perekonomian yang harus segera diatasi. Bukan hanya karena jumlah nominal penduduk miskin yang relatif masih banyak, tetapi juga angka ketimpangannya yang semakin memprihatinkan.

Berdasarkan laporan World Bank (2015) menunjukkan setelah memulihnya perekonomian Indonesia pasca krisis keuangan Asia, PDB riil per kapita Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 5.4 persen per tahun antara 2000 dan 2014. Dari pertumbuhan tersebut, terdapat 45 juta orang (18 persen orang terkaya di Indonesia) mengalami kondisi ekonomi yang mapan serta menikmati kehidupan yang berkualitas relatif lebih tinggi. Akan tetapi, kelompok penduduk yang mapan secara ekonomi tersebut meninggalkan 205 juta penduduk sisanya dengan kualitas hidup yang relatif lebih rendah.

Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Gini



Sumber: BPS, 2019

Berdasarkan grafik 1.1 dapat menunjukkan bahwa trend jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Dari tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 28.6 juta, berkurang menjadi 26 juta pada tahun 2018. Hanya saja penurunan jumlah penduduk miskin mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan oleh angka ketimpangan yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 Indeks gini menunjukkan angka 0.39. Angka tersebut termasuk angka yang cukup tinggi. Artinya ketimpangan ini mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi kepada perlambatan pengentasan kemiskinan. Fakta ini didukung pada laporan tahunan Bank Dunia, lembaga keuangan dunia ini mengingatkan bahwa pengurangan ketimpangan yang tinggi

sangat penting untuk segera diatasi agar tercapai target pengentasan kemiskinan ekstrem secara global di tahun 2030 (World Bank, 2019).

Perjuangan memerangi masalah kemiskinan merupakan perjuangan ketidakseimbangan kekuatan. Menurut Ikhsan (2001) bahwa 99 persen penduduk miskin dalam sub sektor pertanian pangan merupakan seorang petani atau buruh tani. Karena itu perlu untuk menetapkan sektor pertanian pangan sebagai target dalam kebijakan anti kemiskinan. Langkah strategis perlu direncanakan secara matang dan konsisten untuk meningkatkan produksi pangan. Indonesia dengan mayoritas angkatan kerjan yang bekerja di bidang pertanian akan terus menjadi negara importir pangan yang sangat besar. Jumlah impor yang semakin membesar kedepan mengancam ketahanan pangan nasional. Jika kebijakan impor selalu dijadikan alternative utama untuk memenuhi konsep ketahanan pangan maka akan berdampak buruk bagi pengelolaan subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketersediaan modal dasar pembangunan (Bappenas, 2015).

Dalam menangani masalah pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri, seringkali pemerintah melakukan kebijakan instan dengan melakukan kebijakan impor beras. Kebijakan impor beras merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada konsumen. Hanya saja pemerintah juga perlu memperhatikan kepentingan produsen beras dalam hal ini adalah petani padi, pemerintah perlu berupaya dengan mendorong peningkatan produksi padi guna menjaga stabilitas harga bahan makanan dalam jangka panjang agar tidak bergantung pada impor (Widiarsih, 2012 dan Hessie, 2009). Ironisnya, terkadang impor dilakukan disaat stok beras di gudang bulog mencukupi dan situasi menjelang panen raya. Begitu juga fluktuasi harga yang sering terjadi pada komoditas pangan seringkali diatasi dengan kebijakan impor. Kesetabilan harga pangan akan mampu dicapai manakala pemerintah mampu menjamin ketersediaan beras, tetapi nyatanya produksi beras nasional belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Padahal selama ini kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian difokuskan kepada pencapaian swasembada pangan dan stabilitas harga (Godoy dan Dewbre, 2010), sehingga sangat penting kebijakan pemerintah di masa yang akan datang harus berorientasi kepada peningkatan produksi beras.

Masalah pertumbuhan ekonomi juga merupakan variabel penting dalam kaitannya terhadap kemiskinan. Dalam 5 tahun terakhir nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di angka 5 persen. Capaian ini selalu tidak mampu memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 persen. Dampaknya adalah program-program ekonomi yang *pro poor* menjadi terkendala, sehingga pemicu untuk ekspansi ekonomi sulit untuk digerakkan. Implikasi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi adalah agenda pengentasan kemiskinan menjadi terhambat.

Disisi yang lain, kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan strategis yang mampu mendorong produktifitas dalam negeri. Indonesia dalam 5 tahun terakhir melakukan kebijakan ekspansi fiskal yang cukup mengesankan. Diantara kebijakan fiskal yang dilakukan adalah dengan melakukan injeksi dalam perekonomian berupa belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah memiliki peranan yang sangat strategis sebagai regulator dan operator dalam menjalankan perekonomian. Intervensi pemerintah ini menjadi sangat penting jika dalam perekonomian terjadi kegagalan pasar yang menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien

dalam menghasilkan barang dan jasa. Campur tangan pemerintah diperlukan untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi sehingga kondisi pareto optimum dapat tercapai kembali. Harapannya dengan semakin membaiknya infrastruktur semakin meningkatkan produktifitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Solikutal *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa untuk mengurangi kemiskinan di sektor pertanian perlu dilakukan revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali riset dan penyuluhan. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari penelitian ini untuk (1) menganalisis pengaruh kebijakan perberasan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia; (2) menganalisis pengaruh kebijakan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia; (3) menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Menurut (BPS, 2015) penduduk miskin yaitu penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan nonmakanan. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan minimum untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan nonmakanan disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Komoditi kebutuhan terdiri atas 52 jenis komoditi yaitu komoditi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Garis kemiskinan nonmakanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual secara jelas dikemukakan oleh Chambers. Chambers (1996) berpendapat bahwa masalah pokok terciptanya kemiskinan disebabkan oleh fenomena *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. *Deprivation trap* terdiri dari lima unsur yaitu: 1) kemiskinan itu sendiri; 2) kelemahan fisik; 3) keterasingan atau kadar isolasi; 4) kerentanan; dan 5) ketidakberdayaan. Parahnya seringkali kelima unsur tersebut saling terkait, sehingga fenomena perangkap kemiskinan ini berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin. Fenomena ini sejalan dengan riset dari laporan World Bank (2015) tentang ketidakadilan masyarakat miskin dalam menjalani kehidupan bahkan sejak dalam kandungan, lahir hingga dewasa. Dari kelima dimensi tersebut, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama.

Definisi kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai masalah dalam dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Menurut Todaro dan Smith (2006) pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, berdasarkan konsep ini, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya secara layak yakni kebutuhan makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
2. Kemiskinan relatif, Kemiskinan dilihat dari aspek disparitas secara sosial, misalkan seseorang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, tetapi masih sangat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Pada penelitian ini diputuskan untuk melihat kemiskinan sebagai kemiskinan absolut yang diukur dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak.

Dalam perspektif kebutuhan pangan, Sayogyo (1978) mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi perkapita setiap tahun yang sama dengan beras. Sayogyo menjelaskan konsep kemiskinan berdasarkan kecukupan konsumsi beras dengan membedakan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Garis kemiskinan versi Sajogyo adalah nilai rupiah yang setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Menurut Kuncoro (2002) pendekatan Sajogyo memiliki kelemahan mendasar yaitu tidak mempertimbangkan perkembangan tingkat biaya riil. Selain itu, Todaro (2004) mengatakan bahwa penduduk miskin adalah mereka yang pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian. Berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan BPS menunjukkan bahwa sekitar 77 persen penduduk miskin di daerah pedesaan bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu perlu dikaji potensi produksi pertanian khususnya produksi pangan (beras) dan bagaimana produksi pangan tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan analisa dari sisi penyebab terjadinya fenomena kemiskinan, Jhingan (2004), mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif dan yang ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian. Selanjutnya, Suryawati (2005) menyampaikan beberapa penyebab kemiskinan pedesaan, antara lain:

1. *Natural assets*, mencakup tanah dan air. Sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang relatif kecil sebagai mata pencahariannya.
2. *Human assets*, yakni kualitas sumberdaya manusia di pedesaan masih rendah dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.
3. *Physical assets*, masih rendahnya akses masyarakat ke infrastruktur dan pelayanan umum antara lain jalan, listrik dan telekomunikasi.
4. *Financial assets*, yakni tabungan yang masih kecil dan keterbatasan akses untuk memperoleh modal usaha.
5. *Social assets*, lebih kepada pengaruh politik.

Kebijakan Perberasan

Berdasarkan regulasi konstitusi yang tertuang dalam INPRES No. 13 Tahun 2005 tentang kebijakan perberasan. Kebijakan perberasan nasional merupakan paket kebijakan yang terdiri dari 5 instrumen. Diantaranya adalah instrumen peningkatan produksi, diversifikasi, kebijakan harga, kebijakan impor dan distribusi beras untuk keluarga miskin (RASKIN). Kebijakan tersebut dibuat guna melindungi petani dan konsumen dari dampak negatif perdagangan internasional. Pada hakekatnya terdapat tiga aspek yang saling berkaitan dalam kebijakan pangan dan gizi yaitu aspek produksi, distribusi dan konsumsi (Wahab dan Gonarsyah 1989).

Berbagai kebijakan perberasan telah dilakukan di masa orde baru lama dan orde baru, mulai dari Program Kesejahteraan Kasimo, Program Sentra Padi hingga Program Bimas. Pada tahun 1960'an Indonesia memelopori Gerakan Revolusi Hijau sebagai kebijakan yang bertujuan untuk mencapai swasembada beras, sampai akhirnya berhasil berswasembada beras pada tahun 1984. Pada saat swasembada beras, kebijakan peningkatan produktivitas dicapai melalui terobosan teknologi baru, investasi pembangunan prasarana irigasi, subsidi dan pengadaan sarana produksi (benih unggul, pupuk dan pestisida), kebijakan harga dan tata-niaga beras, serta penyediaan kredit bersubsidi, merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984 (Rosegrant *et al.* 1998).

Kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah merupakan intervensi yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas harga dan ketersediaan beras. Perubahan ketersediaan (kuantitas) beras akan berdampak kepada perubahan harga beras. Perubahan harga akan sangat mempengaruhi harga barang non-beras dan mempengaruhi daya beli masyarakat secara langsung. Hal ini tercermin dari proporsi pengeluaran pendapatannya, penduduk miskin menghabiskan hamper seperempat (24 persen) dari anggaran mereka hanya untuk beras, sedangkan bagi masyarakat non miskin anggaran yang dikeluarkan untuk beras hanyalah sebesar 9.4 persen. Lebih dari tiga perempat masyarakat miskin merupakan konsumen netto dimana mereka mengkonsumsi lebih daripada yang mereka hasilkan, bahkan di daerah pedesaan lebih dari 70 persen masyarakat miskin merupakan konsumen netto. Sehingga jika Indonesia mampu mengendalikan ketersediaan beras akan berdampak pada kestabilan harga beras dan menodorong kestabilan harga non-beras, sehingga inflasi bisa dikendalikan. Implikasinya adalah guncangan ekonomi bisa diatasi dan berdampak pada peningkatan dayabeli dan pengurangan jumlah penduduk miskin.

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu sektor keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan Produk Domestik Bruto (Ma'ruf, 2008). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara menandakan semakin baik kegiatan ekonomi diperoleh dari laju pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2008). Dalam perspektif pembangunan di daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada proses pembangunan berkelanjutan merupakan kondisi ideal bagi kelangsungan perkembangan ekonomi (Renggo, 2017).

Menurut Kuznet (dalam Sudewi dkk, 2013) proses pembangunan akan disertai dengan adanya kenaikan *inequality* secara substansial sehingga penduduk miskin akan mendapat bangunan yang kecil dari pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Sudewi dan Wirathi (2013) mendapatkan hubungan yang negatif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan yang rendah bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Hagel dalam tulisannya yang berjudul “*Introduction to The Anatomy of Growth*” berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh perubahan metode produksi dari padat karya ke padat modal. Kenyataan ini sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Hollis Chenery tentang teori pertumbuhan negara. Ia mengatakan, saat terjadinya pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan peningkatan PDB maka akan ada empat proses yang akan menyertainya. Keempat proses tersebut ialah proses akumulasi, proses alokasi, proses demografi dan proses distribusi (Pohan, 2004). Akan tetapi pada kenyataannya proses-proses itu masih menyisakan permasalahan yang mendasar di bidang perekonomian yakni kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, tekanan globalisasi, eksploitasi sumber daya alam serta terpisahnya sektor keuangan dari sektor usaha.

Kebijakan Fiskal

Salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus dalam perekonomian nasional adalah kebijakan Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Pengeluaran pemerintah untuk ketersediaan infrastruktur baik infrastruktur ekonomi, sosial maupun administratif memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat pembangunan suatu wilayah. Pembangunan tersebut dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan wilayah dapat dibuktikan dengan memperhatikan fakta yang terjadi dari suatu daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik pula dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen yang dimiliki pemerintah guna menstimulus perekonomian nasional. Sudah sejak lama investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran untuk infrastruktur dan tingkat konsumsi total menjadi sumber penopang perekonomian nasional. Tidak heran mengapa belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur menjadi penting, karena infrastruktur mendukung aktivitas semua sektor ekonomi. Mulai dari sektor industri manufaktur, kelautan, kehutanan, peternakan, perkebunan dan pertanian. Infrastruktur jalan yang memadai dapat mendukung peningkatan mobilitas arus penduduk dan barang antar wilayah, sehingga dapat menghubungkan satu pusat aktivitas dengan pusat aktivitas lain di area yang berbeda. Oleh karena itu, infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan prasyarat penting bagi sektor swasta untuk menanamkan modalnya dalam perekonomian. Beberapa peneliti menyatakan bahwa

infrastruktur sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan distribusi pendapatan antar wilayah (Calderon dan Serven, 2004).

METODE

Model merupakan sebuah penjelasan dari fenomena aktual sebagai suatu kesatuan sistem atau proses (Koutsoyiannis, 1977). Model penelitian yang disusun dalam penelitian ini menggunakan analisis ekonometrika yaitu analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder dari tahun 1988 - 2017. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari lembaga resmi negara dan swasta yang berkaitan dengan variabel yang dibangun dalam model. Diantara lembaga yang dijadikan sumber referensi dalam pengumpulan data diantaranya adalah; Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Bank Dunia. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan software E-Views 9. Model kemiskinan di Indonesia dibangun melalui model regresi linier berganda antara variabel kemiskinan dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Sebagaimana dapat dinyatakan dalam persamaan ekonometrika di bawah ini.

$$POVY_t = \beta_0 + \beta_1 PBI + \beta_2 TIB_t + \beta_3 HRBE_t + \beta_4 PRTE_t + \beta_5 KF_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

$POVY_t$ = Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode t (Jiwa)

PBI = Produksi Beras Indonesia (Kg)

TIB_t = total impor beras Indonesia pada periode t (Kg)

$HRBE_t$ = Harga beras eceran pada periode t (Rp/Kg)

$PRTE_t$ = Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada periode t (%)

KF_t = Kebijakan Fiskal; Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur periode t (Rp)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi

ε_t = error term

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah: $\beta_2, \beta_3, > 0$ dan $\beta_1, \beta_4, \beta_5 < 0$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Secara teoritis, model ekonometrika yang baik harus memenuhi kriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrika (Koutsoyiannis, 1977). Berdasarkan kriteria ekonomi, semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki tanda (*sign*) parameter estimasi sesuai

dengan hipotesis yang diajukan, artinya semua variabel independen memiliki tanda yang logis secara ekonomi. Secara statistik, nilai koefisien determinasi (R^2) penelitian ini cukup tinggi dengan nilai 0.786759, artinya kontribusi variabel bebas yang terdiri dari produksi beras, total impor beras, harga pokok pembelian pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur sebesar 78.67 persen. Sedangkan sisanya 11.33 persen variasi variabel terikat dijelaskan oleh faktor lain.

Berdasarkan uji F-statistik, nilai probabilitas pada model sebesar 0.000001, nilai ini lebih kecil dari taraf $\alpha = 0.05$. Artinya secara bersama-sama seluruh variabel bebas dalam hal ini variabel produksi beras Indonesia, total impor beras Indonesia, harga pokok pembelian pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel kemiskinan sebagai variabel terikat.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi pada Model Kemiskinan Indonesia

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Elastisitas
C	80832829	4.790546	-1,8363
Produksi Beras	-0.001654	-2.735291*	0,0737
Total Impor Beras	0.002016	3.343091*	0,4040
HPP Beras	4290.535	4.420869*	-0,1629
Pertumbuhan	-1034529.	-5.619833*	-0,0028
Gov Exp Infra	-0.001102	-0.041734	-1,8363
F-statistic	17.70970	R-squared	0.786759
Prob(F-statistic)	0.000001	Durbin-W stat	1.712502

*Signifikan pada taraf α : 5%

Sumber: hasil olah data dengan Eviews, 2019

Pengaruh Kebijakan Perberasan terhadap Kemiskinan

Produksi Beras Indonesia

Berdasarkan tabel 4.1 hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel produksi beras Indonesia memiliki nilai t-hitung 2.735291, nilai ini lebih besar daripada t-tabel (2.064), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel produksi beras Indonesia memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel kemiskinan dengan tanda negatif. Kenaikan jumlah produksi beras akan mampu mendorong penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Secara kepekaan, Variabel kemiskinan tidak responsif terhadap perubahan nilai produksi beras. Hal ini dapat dilihat dari nilai elastisitas produksi beras sebesar 0.0737 sehingga bersifat inelastis, hal ini menunjukkan jika terdapat kenaikan produksi beras yang besar maka Indonesia hanya akan menurunkan jumlah penduduk miskin relatif lebih kecil, begitu pula sebaliknya.

Total Impor Beras Indonesia

Berdasarkan tabel 4.1 hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel total impor beras Indonesia memiliki nilai t-hitung 3.343091, nilai ini lebih besar daripada t-tabel (2.064), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel total impor beras Indonesia memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel kemiskinan dengan tanda positif. Jika terjadi kenaikan jumlah impor beras, maka akan berdampak kepada peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. meski secara kepekaan respon variabel kemiskinan terhadap perubahan jumlah beras impor bersifat inelastis (0.4040), akan tetapi dampaknya cukup terasa terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jika terjadi kenaikan jumlah impor beras sebanyak 10 persen maka akan berdampak kepada peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 4 persen. Artinya kontribusi variabel jumlah impor terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin cukup besar, terlebih lagi jika kebijakan ini di kombinasikan dengan kebijakan yang tidak populer lainnya seperti pengurangan subsidi pangan dan subsidi energi, maka akan berdampak kepada peningkatan jumlah penduduk miskin lebih banyak lagi. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk miskin akibat kebijakan impor, sebaiknya pemerintah memberikan kompensasi kerugian kepada konsumen dengan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka dan perluasan sasaran untuk kebijakan beras miskin (raskin) (Akhmad, 2014).

Harga Pokok Pembelian Pemerintah Komoditi Beras

Berdasarkan tabel 1 hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel harga pokok pembelian pemerintah pada komoditi beras di Indonesia memiliki nilai t-hitung 4290.535, nilai ini lebih besar daripada t-tabel (2.064), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel harga pembelian pemerintah pada komoditi beras memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel kemiskinan dengan tanda positif. Jika terjadi kenaikan harga pokok pembelian pemerintah pada komoditi beras, maka akan berdampak kepada peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. variabel kemiskinan tidak responsif terhadap perubahan variabel harga pokok pembelian pemerintah pada komoditi beras dengan nilai elastisitas 0.1629. Artinya jika harga pokok pembelian pemerintah pada komoditi beras naik 10 persen akan berdampak kepada kenaikan penduduk miskin sebesar 16 persen saja. Hal ini sesuai dengan penelitian Warr (2005) yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga beras di dalam negeri akan berdampak pada peningkatan kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan tabel 1 hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t-hitung 1034529, nilai ini lebih besar daripada t-tabel (2.064), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel kemiskinan dengan tanda negatif. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Secara analisa ekonomi, variabel kemiskinan tidak responsif terhadap perubahan variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai elastisitas sebesar 0.0028 (inelastis). Temuan ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak kecil terhadap penurunan jumlah

penduduk miskin di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Septiadi, Harianto, dan Suharno, 2016) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hasil ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ravallion dan Datt (1996) pada penelitiannya yang dilakukan di India dan Indonesia, dimana Indonesia memiliki karakteristik yang mirip dengan India. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Maka, apabila ingin mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia salah satu upaya yang harus ditempuh adalah dengan memacu pertumbuhan di sektor pertanian. Hasil penelitian yang dilakukan Olowa (2012) juga mendukung hasil penelitian ini, dimana olowa melakukan penelitian di Negeria, dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak memadai adalah penyebab utama kemiskinan di Nigeria.

Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Kemiskinan

Berdasarkan output analisis regresi dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal dalam penelitian ini direpresentasikan melalui variabel belanja pemerintah untuk infrastruktur, dimana variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel kemiskinan. Hal ini dikarenakan dampak ekonomi dari investasi pemerintah terhadap infrastruktur tidak memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Transmisi ekonomi dari kebijakan fiskal ini cukup panjang hingga sampai pada penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. sehingga dampak dari investasi terhadap infrastruktur lebih kepada dampak kebijakan yang bersifat jangka panjang.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Dercon dan Krisnan (1998) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tingkat kemiskinan adalah rumah tangga dengan modal manusia dan fisik yang lebih besar, serta akses infrastruktur jalan yang lebih baik memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Akses jalan yang lebih baik menjadikan manusia menjadi lebih efektif dan efisien dalam beraktivitas. Kemudahan dalam mobilitas tersebut membuat manusia mampu bekerja lebih produktif, sehingga mampu mengangkat drajat perekonomian dan lepas dari kemiskinan.

SIMPULAN

Secara simultan variabel produksi beras, jumlah impor beras, harga pokok pembelian pemerintah pada komoditi beras, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel kemiskinan. Secara parsial Kebijakan perberasan meliputi kebijakan produksi beras, kebijakan impor beras dan kebijakan harga pokok pembelian pemerintah pada komoditas beras berpengaruh nyata terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara parsial kebijakan ekonomi seperti variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan Kebijakan fiskal melalui kebijakan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. (2014). Dampak Kebijakan Tarif Impor Beras terhadap Surplus Produsen dan Konsumen. *Majalah Perencanaan Pembangunan*. Edisi 01 Tahun XX Mei 2014. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kemiskinan; Konsep dan Metodologi*. Jakarta (ID): BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Data Penduduk Miskin dan Indeks Gini Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Calderon, C dan Serven, L. (2004). *The Effect of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution*. Working paper. 270.
- Chambers, R. (1996). *Rural Development: Putting the Last First*. London (GB): Longman Group Limited London Reprinted.
- Dercon, S dan Krishnan, P. (1998). *Changes in Poverty in Rural Ethiopia 1989– 1995: Measurement, Robustness tests and Decomposition*. CSAE Working Paper Series. 98(7).
- Godoy, D.C dan Dewbre, J. (2010). *Economic Importance of Agriculture for Sustainable Development and Poverty Reduction: Findings from a case study of Indonesia*. OECD. *Global Forum on Agriculture*.
- Hessie, R. (2009). *Analisis Produksi dan Konsumsi Beras Dalam Negeri serta Implikasinya Terhadap Swasembada Beras di Indonesia*. Tersedia dari IPB Repository <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/14198>
- Ikhsan, M. (2001). *Kemiskinan dan Harga Beras*. Dalam Suryana dan Mardianto (Editor) *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universtas Indonesia, Jakarta.
- Jhingan, M.L. (2003). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah: D. Guritno. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koutsoyiannis. (1977). *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods*. Edisi ke-2. London (GB): The MacMillan Press Ltd.
- Kuncoro, M. (2002). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Ed Ke-3. Yogyakarta (ID): UPP-AMPYPKN.
- Ma'ruf, A. L. (2008). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya*. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.

- Olowa, O. W. (2012). Concept, Measurement and Causes of Poverty: Nigeria in Perspective. *American Journal of Economics*. 2(1), 25-36.
- Pohan, M. (2004). Transformasi Ekonomi, Struktur Masyarakat Berbias Gender Dan Kesejahteraan Pekerja Perempuan Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha*. 4, 44.
- Renggo, Y. R. (2017). Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 – 2015. *Jurnal Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. 11(1).
- Rosegrant, M. W., Kasryno, F., Perez, N. D. (1998). Output Response to Prices and Public Investment in Agriculture: Indonesian Food Crops. *Journal of Development Economics, Elsevier Holland*. (55), 333-352.
- Sayogyo. (1978). Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan: Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia, Perkembangan Pemikiran 1965-1980. Jakarta (ID): PT Gramedia
- Septiadi, D., Harianto, H., & Suharno, S. (2016). Dampak Kebijakan Harga BEras dan Luas Areal Irigasi terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 4(2), 91. <https://doi.org/10.29244/jai.2016.4.2.91-106>
- Solikatun, S., Masruroh, Y., Zuber, A. (2014). Kemiskinan dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 3(1), 70-90.
- Sudewi, Ni Nyoman Ayu. Wiranthi. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Propinsi Bali. *E-jurnal EP Unud*. 2(3), 2303-0178.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensi. *JMPK* 8 (3).
- Todaro, M. P. (2004). Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga. Edisi ke-8. Jakarta (ID): Erlangga.
- Todaro, M. dan Smith, S. (2008). Pembangunan Ekonomi Edisi ke-9. Jakarta: Erlangga.
- Wahab, R. D dan Gonarsyah, I. (1989). Tinjauan Ringkas Mengenai Kebijakan Pangan dan Gizi di Indonesia. *Majalah Pangan*. 1(1), 29-40.
- Warr, P. G. (2005). Food Policy and Poverty in Indonesia: A General Equilibrium Analysis. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*. 49(4), 429-451.
- Widiarsih, D. (2012). Pengaruh Sektor Komoditi Beras Terhadap Inflasi Bahan Makanan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. 2(6), 244-256.
- World Bank. (2015). Laporan Tahunan Bank Dunia. Jakarta: Bank Dunia

World Bank. (2019). Laporan Tahunan Bank Dunia. Jakarta: Bank Dunia